



DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peran Komisaris Independen pada Kualitas Laporan Keuangan

Rahmiyatus Syukra

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia, rahmiyatus@upnvj.ac.id

Corresponding Author: rahmiyatus@upnvj.ac.id

Abstract: *This study aimed to review the literature on the role of independent commissioners on the quality of financial reports. Novelty of this study was expected to produce findings and innovations regarding the role of independent commissioners on the quality of financial reports. Ultimately, this study was expected to provide additional information on whether the presence of independent commissioners can have an impact on the quality of financial reports and improve information for users of financial reports. Results of this study based on several studies that the author has collected, were the independent commissioners have a positive effect on the quality of financial reports, in accordance with Article 1 number 6 of UU PT which commissioners is a company organ tasked with carrying out general and/or specific supervision in accordance with articles of association and providing advice to the directors so that directors can give more qualified financial reports.*

Keywords: *Quality of Financial Reports, Independent Commissioners*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara literatur peran komisaris independen pada kualitas laporan keuangan. Pembaharuan dalam penelitian ini adalah penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan dan inovasi mengenai peran komisaris independen terhadap kualitas laporan keuangan. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi apakah adanya komisaris independen bisa memberikan dampak pada kualitas laporan keuangan dan meningkatkan informasi bagi pengguna laporan keuangan. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang penulis kumpulkan adalah komisari independen mempunyai pengaruh yang positif terhadap laporan keuangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU PT, sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU PT dimana dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atas khusus sesuai dengan anggaran dasar serta nasihat kepada direksi sehingga nantinya direksi bisa menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. dimana dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sehingga nantinya direksi bisa menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas.

Kata Kunci: *Kualitas Laporan Keuangan, Komisaris Independen*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, laporan keuangan didefinisikan sebagai sumber informasi yang sangat penting bagi perusahaan tidak hanya pihak internal yaitu manajemen tapi juga pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, penanam modal, khalayak ramai, maupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. lembaga keuangan, masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Scott (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyajikan informasi terkait posisi, kinerja, bahkan arus kas keuangan. Informasi yang akan dilaporkan tersebut akan menimbulkan dampak ataupun manfaat sebagai penilai kinerja perusahaan serta pembuat keputusan selanjutnya. Oleh karena itu, laporan keuangan yang berkualitas akan membantu pihak internal maupun eksternal dalam menilai perusahaannya dengan lebih baik dan benar.

Selanjutnya, kasus manipulasi laporan keuangan baru-baru ini terjadi lagi di BUMN sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangannya. Salah satunya adalah PT. Indofarma Tbk. Pada tahun 2024 yang terkena kasus manipulasi keuangan, dimana BPK menemukan bahwa adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan tersebut beserta anak perusahaannya, termasuk penggelembungan persediaan, rekayasa transaksi, dan pencatatan fiktif yang berpotensi merugikan negara hingga 371,8 Miliar. Hal tersebut tentunya menimbulkan akibat bahwa laporan keuangan perusahaan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kasus tersebut terungkap karena komisaris utama PT. Indofarma, Laksono Trisnantoro mengundurkan diri dan mengungkapkan dugaan manipulasi yang telah terjadi sejak lama.

Banyaknya kasus yang terjadi tidak sejalan dengan dirombaknya jajaran direksi dan komisaris BUMN, harusnya pihak internal BUMN bisa mewujudkan kondisi yang kondusif sehingga bisa menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dan akhirnya BUMN bisa lebih maju kedepannya bukan malah merugi bahkan merugikan negara ratusan miliar. Pada tahun 2024 terdapat beberapa pihak eksternal yang diangkat tidak hanya sebagai komisaris tetapi juga sebagai direktur di BUMN. Dengan diangkatnya para pejabat partai tersebut diharapkan BUMN bisa semakin baik lagi kedepannya karena ada pihak eksternal yang ikut menjaga dan mengelola BUMN. Merunut pada Pasal 120 ayat 2 UU PT menjelaskan bahwa komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari pihak luar. Bravo dan Reguera-Alvarado, 2018 juga menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan komisaris independen akan mengarah kepada kualitas keuangan yang jauh lebih baik.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan kajian literatur mengenai peran pihak eksternal dalam hal ini komisaris independen pada kualitas laporan keuangan BUMN.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin & Lincoln (1994) dalam (Anggito & Setiawan, 2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*literatur review*) dimana pengambilan data menggunakan buku, jurnal atau literatur lainnya. Rusmawan (2019) menjelaskan studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku, jurnal atau literatur yang menjelaskan tentang landasan teori. Sama halnya dengan pengumpulan data dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber - sumber seperti buku, karya tulis, serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Hakim (2013) mengungkapkan studi literatur yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

penelitian yang terdahulu. Studi literatur atau studi pustaka bertujuan untuk mencari berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Pendekatan kualitatif dalam studi literatur (*literature review*) digunakan untuk merangkum hasil penelitian terdahulu yang nanti penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Metode ini adalah suatu teknik melakukan integrasi data untuk mendapatkan teori maupun konsep baru atau tingkatan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh (Perry & Hammond, 2002). Studi literature review dipakai untuk menghimpun data atau sebuah sintesa sumber-sumber yang berhubungan dengan topik penelitian dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penulisan (Nursalam, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu *agency theory*, menurut teori keagenan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan terjadi saat *principal* (pihak pemberi kerja) mendelegasikan tugas atau layanan kepada agen (pihak yang diberi tugas), dan agen tersebut memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Adapun keterkaitan kajian ini dengan teori agensi adalah komisariss independen yang berperan sebagai agen yang dipercayakan penuh untuk menjalankan segala aktivitas perusahaan mempunyai tanggung jawab penuh kepada *principal*.

Laporan keuangan, sesuai dengan PSAK 201, adalah gambaran terstruktur mengenai posisi dan kinerja finansial suatu entitas atau perusahaan. Kemudian, laporan keuangan juga laporan keuangan juga berfungsi sebagai bukti pertanggungjawaban manajaemen atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan penuh kepada mereka. Suwardjono (2016) mengungkapkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas merupakan cerminan atau ringkasan dari seluruh aktivitas transaksi finansial yang telah diproses dalam kegiatan akuntansi perusahaan. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sangat terkait dengan kinerja perusahaan yang bisa dilihat pada laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. Sebuah laporan keuangan yang berkualitas dikatakan berkualitas apabila laba tahun berjalan mampu menjadi indikator kuat untuk memproeksi laba perusahaan di tahun mendatang. Kualitas dari laporan keuangan dapat dari pencatatan transaksi perusahaan sehingga nantinya membentuk laporan keuangan. Selain itu, setiap transaksi keuangan yang telah dilakukan harus dicatat sesuai dengan komponen laporan keuangan serta standar akuntansi yang baik dan benar.

Selanjutnya, Effendi (2016) mendefinisikan komisariss independen sebagai anggota komisariss yang dipilih untuk mewakili pemegang saham independen (saham minoritas) yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota dewan komisari, ataupun anggota direksi lainnya, dengan maksud untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Menurut POJK No. 17 Tahun 2023, komisariss independen adalah anggota dewan komisariss yang tidak punya kaitan finansial, posisi manajemen, kepemilikan saham, ataupun hubungan keluarga dengan pihak-pihak pemegang kepentingan seperti direksi, komisariss lainnya, pemegang saham pengendali, termasuk hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara mandiri.

Pembahasan

Pada Pasal 120 ayat 2 UU PT menegaskan bahwa komisariss independen merupakan komisariss yang berasal dari pihak eksternal. Francisco dan Reguera (2018) juga menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh komisariss independen akan mengarah pada kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Abdulmalik (2015)

yang menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen. Alasannya, banyak komisaris cenderung tetap terikat pada nominasi yang diajukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Selain itu, Syukra dan Agustine (2022) juga menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan BUMN. Hal ini juga diperkuat dengan temuan penelitian lain yang dilakukan oleh Armstrong, dkk (2014) yang menjelaskan bahwa adanya peningkatan pemantauan dari komisaris independen akan membatasi manajemen laba dan akan mengarah pada peningkatan transparansi perusahaan.

Seiring dengan itu, Akeju dan Babatunde (2017) juga berpendapat bahwa karakteristik yang dimiliki oleh komisaris pada mekanisme pengelolaan perusahaan secara internal akan memberikan peningkatan pada kualitas laporan keuangan pada sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian D'onza dan Lamboglia (2014) yang menekankan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh dewan komisaris akan menjadi pemantauan yang unik untuk melakukan koreksi dan deteksi manipulasi laporan keuangan.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU PT yang mana dewan komisaris ialah organ perusahaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta mendalam sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Komisaris merupakan sebutan untuk anggota dewan komisaris, yang perannya mencakup seperti pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kegiatan perusahaan secara keseluruhan, disamping memberikan masukan kepada direksi. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan yang mana adanya komisaris independen pada suatu perusahaan akan membuat laporan keuangan semakin baik. Hal ini disebabkan oleh komisaris independen yang bertindak sebagai perwakilan investor dan tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan. Disamping itu, komisaris independen juga berperan dalam memantau internal perusahaan, sehingga mereka dapat mengevaluasi laporan keuangan yang diterbitkan dengan lebih baik, demi memastikan keakuratannya sesuai dengan fakta.

Kemudian, penelitian Indrasti (2020) juga menemukan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berapa pun jumlah komisaris independen tidak mempengaruhi integritas laporan keuangan perusahaan. Terlepas dari jumlahnya, adanya komisaris independen tidak berpengaruh pada keandalan atau integritas laporan keuangan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Pasalnya, tugas dan fungsi mereka lebih pada pengawasan kebijakan dan operasional umum emiten atau perusahaan publik serta memberi nasihat kepada direksi.

Kualitas laporan keuangan dinilai dari tingkat kejujuran, transparansi, dan kepatuhannya terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Pentingnya integritas ini, menurut Supriyono (2018), terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kepercayaan penanam modal dan para pengguna laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan yang memiliki integritas tinggi menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi, sehingga laporan keuangan yang berintegritas pasti akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan ke arah yang jauh lebih baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nompa, dkk. (2025) yang melaporkan bahwa beberapa perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang cukup tinggi justru mempunyai tingkat integritas laporan keuangan yang rendah. Hal ini terlihat pada PT Kimia Farma Tbk (KAEF), di mana meskipun memiliki proporsi komisaris independen sebesar 0,50 pada 2021, integritas laporannya justru rendah di angka 1,87 dan bahkan anjlok menjadi 0,65 pada 2022. Hal terjadi juga pada PT Indofarma Tbk (INAF) yang, dengan komisaris independen 0,67 pada 2020, memiliki integritas laporan keuangan sebesar 3,82.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis komisaris independen diharapkan dapat memperkuat sistem tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi, kenyataannya dalam beberapa kasus mereka justru tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau bahkan terpengaruh oleh kepentingan internal perusahaan. Komisaris independen juga dapat memiliki pengaruh yang terbatas terutama pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi atau manajemen yang sangat dominan. Berdasarkan hal tersebut, hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa peran komisaris independen tidak selalu memberikan kontribusi secara positif terhadap integritas kualitas laporan keuangan sebuah perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian terdahulu, peran komisaris independen memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dimulai dari penelitian oleh Syukra dan Augustine (2022), Armstrong, dkk (2014), Akeju dan Babatunde (2017) dimana peningkatan dan pemantauan yang dilakukan oleh komisaris independen akan sejalan dengan kualitas laporan keuangan ke arah yang jauh lebih baik. Pernyataan ini juga konsisten dengan Pasal 1 angka 6 UU PT yang menegaskan bahwa dewan komisaris ialah organ perusahaan yang bertugas sebagai pengawasan kebijakan serta pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (umum atau khusus sesuai AD/ART), serta menasihati direksi. Dewan komisaris juga mempunyai tugas utama mengawasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen perseroan maupun usahanya, serta memberikan saran kepada direksi.

Namun, hal ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Indrasti (2020), Supriyono (2018), dan Nomp, dkk. (2025) dimana komposisi komisaris independen tidak memiliki pengaruh atau dampak terhadap integritas laporan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan pun jadi tidak baik karena laporan keuangan berintegritas pasti akan menghasilkan kualitas yang baik.

REFERENSI

- Abdulmalik, S. 2015. Financial Reporting Quality: The Role of Independent And Grey Directors, Board Continuous Training And Internal Audit Function. *IPBJ* 7(2): 40-57.
- Akeju, J.B dan A. Babatunde, 2017. Corporate Governance and Financial Reporting Quality in Nigeria. *International Journal of Information Research and Review*.
- Anggito, & Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak
- Armstrong, C. S., Core, J. E., & Guay, W. R. (2014). Do independent directors cause improvements in firm transparency? *Journal of Financial Economics*, 113(3), 383–403.
- Badan Pemeriksa Keuangan (2024). Gaji Karyawan Tak Dibayar, Begini Liciknya Indofarma Manipulasi Laporan Keuangan. [https://kaltim.bpk.go.id/gaji-karyawan-tak-dibayar-begini-liciknya-indofarma-manipulasi-laporankeuangan/#:~:text=Kekinian%2C%20Badan%20Pemeriksa%20Keuangan%20\(BPK,hingga%20Rp%20371%2C8%20miliar](https://kaltim.bpk.go.id/gaji-karyawan-tak-dibayar-begini-liciknya-indofarma-manipulasi-laporankeuangan/#:~:text=Kekinian%2C%20Badan%20Pemeriksa%20Keuangan%20(BPK,hingga%20Rp%20371%2C8%20miliar)
- Bravo, F., & Reguera-Alvarado, N. (2018). Do independent director's characteristics influence financial reporting quality? *Revista Espanola de Financiacion y Contabilidad*, 47(1), 25–43.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi Edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Empat
- Hakim, M.I (2002). *Pokok-pokok materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal 11.,
- Indrasti, A.W (2020). Peran Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang serta Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 2, 152-163
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure, *Journal of Finance Economic* 3:305-360

- Nompa, E.R., dkk. (2025). Good Corporate Governance dan Integritas Laporan Keuangan: Studi Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2(2), E-ISSN: 3031-0539
- Nursalam. (2016). Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pendekatan Praktis (4th). Jakarta: Salemba Medika
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17 Tahun 2023. Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Standar Akuntansi Indonesia 201. (2024). Penyajian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia
- Perry, A., & Hammond, N. (2002). Systematic Reviews: The Experiences of a PhD Student. *Psychology Learning & Teaching*, 2(1): 32–35
- Pribadi, B (2024). Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar Pegawai sampai Jual Aset. <https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-indofarma-kolaps-terjerat-pinjol-tak-bisabayar-pegawai-sampai-jual-aset--13238>
- Putri, R. (2024). <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-politikus-yang-diangkat-jadi-komisaris-bumn-37050>
- Rusmawan, U. (2019). Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory (6th Edition)*. Pretince Hall
- Supriyono, H. (2018). *Teori Keagenan Dalam Konteks Corporate Governance*. Mitra Wacana Media.
- Suwardjono. (2016). *Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Syukra, R dan F. Agustine. (2022). Narsisme Direktur, Komposisi Komisaris Independen dan Direktur Gender pada Kualitas Laporan Keuangan BUMN. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 32 No 12, e-ISSN 2302-8556